



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 54/ /BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. BUPATI BANGKA,



KATA PENGANTAR

Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja. Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2025 kembali menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan mempedomani Renstra Dinakerperindag Tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 lingkup Dinakerperindag Kabupaten Bangka.

Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2025 memuat Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran strategis Dinakerperindag. Nomenklatur Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2025 telah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 2024 memerlukan penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita bersama untuk mencapai Bangka yang lebih nyaman untuk semua. Amin.

Sungailiat, 20 Juni 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	
EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	7
BAB III	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB IV	
PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. SK Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025	
2. Jadwal Tentatif Tahapan Penyusunan Perubahan RKPd dan Perubahan Renja PD Tahun 2025	
3. Tabel Verifikasi Target Indikator Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	8
Tabel 2.2 Tabel Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Bangka	10
Tabel 3.1 Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif	28
Tabel 3.2 Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu, Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Perubahan Renja.

Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Perubahan RKPD;
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinkesperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan RKPD-P dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Tahun 2024 mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 2024 memerlukan penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Dokumen Perubahan Perangkat Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD-P Tahun Anggaran 2025 Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN, berisi tentang : Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai pada Triwulan I.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan data kinerja rencana strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan Penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka per program sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	PROGRAM	REALISASI (%)			
		KINERJA	KATEGORI	KEUANGAN	KATEGORI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,89	SR	27,85	SR
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	SR	0	SR
3.	Program Hubungan Industrial	17,50	SR	12,50	SR
4.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	SR	20,54	SR
5.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	37,50	SR	63,01	R
6.	Program Standarisasi dan Pelindungan Konsumen	5,47	SR	6,04	SR
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3,03	SR	4,25	SR

Keterangan Kategori :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kualitas Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
% ≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Analisis Hasil Pengendalian Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan I tahun 2025 dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dengan 7 (Tujuh) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan hasil **Sangat Rendah (SR)**.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sangat rendah dikarenakan :

1. Adanya Efisiensi Anggaran TA 2025;

2. Adanya Perubahan Sumber Dana (Dari Dana DAU SG Dukungan Bidang Pendidikan ke DAU);
3. Adanya Pergeseran Sub Kegiatan (Salah pengentryan sumber dana);
4. Kegiatan yang dilaksanakan masih dalam proses pencapaian target dan keuangan serta Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II sampai dengan IV.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah :

1. Memastikan pagu anggaran yang diberikan kepada OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka sehingga tidak perlu lagi efisiensi anggaran;
2. Memastikan Sumber dana yang dilimpahkan ke OPD;
3. Lebih teliti dalam mengentry kode rekening dan sumber dana.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Bangka

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		2 07		BIDANG URUSAN TENAGA KERJA		29.114.665.300	6.862.294.307	7.466.009.043		2.079.457.261			2.079.457.261			8.941.751.568			30,71		
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	25,62	27.369.665.300	26.250.194	25,59	17.439.000	0,00		-	0,00		-	0,00	26.250.194	0,00	0,10	DINAKER PERINDAG
					Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	11,17		7.595.000	11,12	16.012.500	0,00		-	0,00		-	0,00	7.595.000	0,00		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0%	-	5.433.866.711	0,00	6.177.274.216	0,00		1.824.206.870	0,00		1.824.206.870	0,00	7.258.073.581	0,00		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah				Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah (Indeks)	64,65		-	64,55	26.160.000	0,00		4.590.192	0,00		4.590.192	0,00	4.590.192	0,00		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4		1.265.594.327	4	1.142.473.327	0,00		227.022.650	0,00		227.022.650	0,00	1.492.616.977	0,00		
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100		128.988.075	100,00	86.650.000	0,00		23.637.549	0,00		23.637.549	0,00	152.625.624	0,00		

Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan	2	07	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	270.000.000	26.250.194	100	17.439.000	25,00			25,00	0		25,00	26.250.194	25,00	9,72		
							Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100		7.595.000	100	16.012.500	25,00			25,00	0		25,00	7.595.000	25,00			
	2	07	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	39	150.000.000	26.250.194	13	17.439.000	69,23	9	-	69,23		-	0	26.250.194	0,00	17,50	
	2	07	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	42	120.000.000	7.595.000	24	16.012.500	16,67	4	-	16,67		-	0	7.595.000	0,00	6,33	
	2	07	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	19.165.000.000	5.433.866.711	100	6.177.274.216	25,00		1.824.206.870	25,00		1.824.206.870	25,00	7.258.073.581	25,00	37,87	
	2	07	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang 30 laki-laki dan 31 perempuan)	183	19.105.000.000	5.408.399.211	54	6.153.528.716	100,00	54	1.817.371.870	100,00	54	1.817.371.870	29,51	7.225.771.081	16,12		
	2	07	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	30.000.000	22.265.000	12	13.745.500	25,00	3	4.920.000	25,00	3	4.920.000	8,33	27.185.000	23,15	90,62	
	2	07	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	126	30.000.000	3.202.500	42	10.000.000	26,19	11	1.915.000	26,19	11	1.915.000	8,73	5.117.500	6,93	17,06	

			2	07	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap (%)	100	309.000.000	-	100	9.750.000	25,00	4.590.192	0,00	4.590.192	0,00	4.590.192	0,00	1,49			
									Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100			100	16.410.000	25,00	-	0,00		0,00		0,00				
									Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50,00			50,00		0,00	-	0,00		0,00		0,00				
			2	07	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	130.000.000	-	1	9.750.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
			2	07	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	33	9.000.000	-	11	16.410.000	27,27	3,00	4.590.192	27,27	3	4.590.192	3	4.590.192	9,09	51,00
			2	07	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang 15 laki-laki dan 15 Perempuan)	30	170.000.000	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
			2	07	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah (%)	100	1.137.665.300	100.800.010	100	58.740.000	25,00	25	23.481.492	25,00	23.481.492	25,00	124.281.502	25,00	10,92		
			2	07	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	1.109.665.300	100.800.010	12	42.330.000	25,00	3	18.891.300	25,00	3	18.891.300	3	119.691.310	8,33	10,79
			2	07	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	36	14.000.000	-	12	-	25,00	3	-	25,00	3	-	3	-	8,33	0,00
			2	07	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	14.000.000	-	12	16.410.000	25,00	3	4.590.192	25,00	3	4.590.192	3	4.590.192	8,33	32,79

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	07	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan aset perangkat daerah (%)	6,20	1.215.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
	2	07	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	2	485.000.000	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0,00		
	2	07	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	3	135.000.000	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0,00		
	2	07	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	70	195.000.000	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0,00		
	2	07	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	1	400.000.000	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	0,00		
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	07	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	4.285.000.000	1.164.794.317	100	1.083.733.327	25,00	203.541.158	100,00	203.541.158	100,00	1.368.335.475	100,00	31,93			
	2	07	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	3.260.000.000	834.472.647	12	565.700.900	25,00	3	128.525.376	25,00	3	128.525.376	3	962.998.023	8,33	29,54
	2	07	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan (Laporan)	36	575.000.000	211.018.882	12	431.314.057	25,00	3	51.764.822	25,00	3	51.764.822	3	262.783.704	8,33	45,70
	2	07	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	36	450.000.000	119.302.788	12	86.718.370	25,00	3	23.250.960	25,00	3	23.250.960	3	142.553.748	8,33	31,68
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2	07	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara (%)	75,00	988.000.000	128.988.075	65,00	86.650.000	25,00	23.637.549	90,00	23.637.549	90,00	152.625.624	120,00	15,45			
	2	07	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Mobil Motor	4 14	743.000.000	118.403.075	4 13	78.310.000	4,00 1,00	0 0	23.637.549	4,00	0	23.637.549	0	142.040.624	0,00	19,12
	2	07	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	90	105.000.000	10.585.000	30	8.340.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0	10.585.000	0,00	10,08
	2	07	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	140.000.000	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													27,89	27,85	27,89	0,00	5,81	0,10					
Predikat Kinerja													SR	SR	SR	SR	SR	Bidang Pelatihan dan Penempatan					

2	Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (%)	88,00	60.000.000		-	0,00	-	0,00		-	37,50		-	37,50		-	42,61	0,00		
	Tersusunnya Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah	2	07	02	2	01		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD yang disusun (Dokumen)	3	60.000.000		-	0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0,00		
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	2	07	02	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	3	30.000.000		-	0	-	0,00	0,00		-	0,00	0	-	0		-	0,00	0,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2	07	03	2	01	0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro (orang)	75	30.000.000		-	0	-	0,00	0,00		-	0,00	0	-	0		-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Predikat Kinerja										SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		DINAKER PERINDAG		
3	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten (%)	60,00	760.000.000		43.373.395	56,00	100.000.000	0,00			-	42,58		-	42,58		43.373.395	70,97	5,71	
	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	2	07	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan (%)	57,14	640.000.000		43.373.395	53,85	100.000.000	0,00			-	29,03		-	29,03		43.373.395	50,81		
		2	07	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	210	540.000.000		43.373.395	20	100.000.000	0,00	0,00		0,00	0	-	0		-	0	43.373.395	0,00	8,03
		1	03	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	3	100.000.000		-	0	-	0,00	0,00		0,00	0	-	0		-	0,00	0,00		

Meningkatnya Pembinaan LPKS	2	07	03	2	02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina (%)	100	60.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
	2	07	03	2	0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (Lembaga)	12	60.000.000	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	0,00	0,00
Meningkatnya konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	2	07	03	2	03	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas (%)	45,00	60.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	2	07	03	2	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	45	60.000.000	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03			
Predikat Kinerja													SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	DINAKER PERINDAG	
4 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	100	450.000.000	-	83,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	2	07	04	2	01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL (%)	57,14	180.000.000	-	18,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	2	07	04	2	0002	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	225	90.000.000	-	0	0,00	0,00	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
	2	07	04	2	0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	45	90.000.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	

		2	07	04	2	03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker (%)	28	270.000.000		-	25,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
		2	07	04	2	03	0002 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (kanir Hub) (Pencaker dan Pemberi Kerja)	180	180.000.000		-	0	-	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0,00
		2	07	04	4	03	0003 Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja (Orang)	90	90.000.000		-	0	-	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR	DINAKER PERINDAG
5	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (%)	49,04	535.000.000	42.810.500	47,77	39.350.000	0,00	4.920.000	0,00	4.920.000	0,00	47.730.500	0,00	8,92	
		2	07	05	2	01	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	96,25	175.000.000	11.390.000	91,46	15.450.000	0,00	2.460.000	0,00	2.460.000	0,00	13.850.000	0,00	7,91	
		2	07	05	2	01	0001 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online (Perusahaan)	30	75.000.000		-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0,00
		2	07	05	2	01	0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	3	100.000.000	11.390.000	20	15.450.000	5,00	1	2.460.000	5,00	1	2.460.000	1	13.850.000	33,33

		2	07	05	2	02	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	62,5	360.000.000	31.420.500	62,50	23.900.000	12,50	2.460.000	12,50	2.460.000	12,50	33.880.500	20,00	9,41		
		2	07	05	2	0002	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	48	120.000.000	31.420.500	16	23.900.000	25,00	4	2.460.000	25,00	4	2.460.000	4	33.880.500	8,33	28,23
		2	07	05	2	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi (Asosiasi dan SP)	3	60.000.000	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		2	07	05	2	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Lembaga)	3	180.000.000	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		17,50	12,50	17,50	12,50	10,42	8,92			
													Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR			
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KETENAGAKERJAAN		7.605.359.043	2.084.377.261	2.084.377.261	9.032.855.463					
													Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Ketenagakerjaan (%)		11,35	27,41	11,35	27,41	3,24	0,10			
													Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Ketenagakerjaan		SR	SR	SR	SR	SR	SR			

2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi (%)	70	9.642.000.000	1.865.221.140	70,00	1.606.650.450	0,00	0,00	330.001.591	0,00	330.001.591	0,00	2.195.222.731	0,00	22,77	DINAKER PERINDAG	
		3	30	03	2	01		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	87,5	9.402.000.000	1.865.221.140	75,00	1.606.650.450	0,00	0,00	330.001.591	0,00	330.001.591	0,00	2.195.222.731	0,00	23,35		
		3	30	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	402.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
		3	30	03	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	9.000.000.000	1.865.221.140	1	1.606.650.450	0,00	0,00	330.001.591	0,00	0	330.001.591	0,00	2.195.222.731	0,00	24,39	
		3	30	03	2	02		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	100	240.000.000	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
		3	30	03	2	02	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (Dokumen)	3	240.000.000	-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00		20,54	0,00		20,54			0,00	24,39		
Predikat Kinerja														SR		SR	SR		SR			SR	SR		
3	Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar (%)	100	500.000.000	911.972.000	90,00	918.287.680	33,75		578.569.000	33,75	578.569.000	33,75	911.972.000	#VALUE!	182,39	DINAKER PERINDAG	
		3	30	04	2	02		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	95,00	290.000.000	911.972.000	90,00	918.287.680	33,75		578.569.000	33,75	578.569.000	33,75	911.972.000	35,53	314,47		
		3	30	04	2	02	0001	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	36	180.000.000	34.040.000	12	27.987.680	25,00	3	8.350.000	25,00	3	8.350.000	3	34.040.000	8,33	18,91	
		3	30	04	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	15	110.000.000	877.932.000	6	890.300.000	50,00	3	570.219.000	50,00	3	570.219.000	3	877.932.000	20,00	0,00	

6	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen	3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan (%)	43,13	900.000.000		54.706.986	39,29	91.600.000	0,00	-	5.534.578	0,00		5.534.578	0,00	60.241.564	0,00	6,69	DINAKER PERINDAG
		3	30	06	2	01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang (%)	94,39	900.000.000		54.706.986	85,81	91.600.000	5,73		5.534.578	5,73		5.534.578	5,73	60.241.564	6,07	6,69	
		3	30	06	2	01	0001 Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1650	450.000.000		49.231.986	1500	81.600.000	5,73	86	3.834.578	5,73	86	3.834.578	86,00	53.066.564	5,21	11,79	
		3	30	06	2	01	0002 Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina (Orang)	500	450.000.000		5.475.000	500	10.000.000	5,20	26	1.700.000	5,20	26	1.700.000	26,00	7.175.000	5,20	1,59	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															5,47		6,04	5,47	6,04		5,21	0,00			
Predikat Kinerja															SR		SR	SR	SR		SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERDAGANGAN															2.616.538.130		914.105.169		914.105.169		3.167.436.295				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perdagangan (%)															14,32		34,94	14,32	34,94		2,05	34,46			
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perdagangan															SR		SR	SR	SR		SR	SR			
		3	31				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.535.000.000		16.537.287.034		3.324.000.000			141.327.522			141.327.522		16.678.614.556		1086,55	
5	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM (%)	0,80	1.280.000.000		16.537.287.034	0,70	3.324.000.000	0,04		141.327.522	0,04		141.327.522	0,04	16.678.614.556	5,00	651,51	DINAKER PERINDAG
		3	31	02	2	01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (%)	30	1.280.000.000		16.537.287.034	25,00	3.324.000.000	2,00		141.327.522	2,00		141.327.522	0,00	16.678.614.556	0,00	1303,02	
		3	31	02	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri (Dokumen)	3	130.000.000		-	1	45.000.000	0,00	0,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3	31	02	2	01	0002 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri. (Dokumen)	3	90.000.000		-	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		3	31	02	2	01	0005 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. (Dokumen)	3	1.060.000.000		16.537.287.034	11	3.279.000.000	9,09	1,00	141.327.522	9,09	1	141.327.522	0	16.678.614.556	0,00	1573,45	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															3,03		4,25	3,03	4,25		0,00	651,51			
Predikat Kinerja															SR		SR	SR	SR		SR	ST			

6	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS (%)	40,00	120.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DINAKER PERINDAG		
		3	31	03	2	01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri (%)	40,00	120.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
		3	31	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINAs yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3	60.000.000	0	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	0	0,00	0,00
		3	31	03	2	01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	60.000.000	0	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	0	0,00	0,00
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					

3	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS (%)	20,00	135.000.000		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00		0,00		DINAKER PERINDAG							
		3	31	04	02	01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS (%)	5,00	135.000.000		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00		0,00									
		3	31	04	02	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) (Dokumen)	3	45.000.000		-	0		-	0,00	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00										
		3	31	04	02	01	0002	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS (Dokumen)	3	90.000.000		0	0		-	0,00	0,00		-	0	0		-	0		-	0,00	0,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00			0,00			0,00				0,00			0,00																
Predikat Kinerja										SR			SR			SR				SR				SR															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERINDUSTRIAN										3.324.000.000					141.327.522					141.327.522					16.678.614.556														
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perindustrian (%)										1,01			4,25		1,01				4,25					0,00		1086,55													
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perindustrian										SR			SR		SR				SR					SR		ST													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN										13.545.897.173					3.139.809.952					3.139.809.952					28.878.906.314														
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian (%)										11,42			23,18		11,42				23,18					3,56		109,42													
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian										SR			SR		SR				SR					SR		ST													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		:																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):																																							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang direncanakan Tahun Anggaran 2025 ada 7 (Tujuh) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 24 (Dua puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1. Sub Kegiatan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

- d. Kegiatan Administrasi Umum**
 - 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 2. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
 - 1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

III. Program Hubungan Industrial

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka;

IV. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

V. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

VI. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

VII. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Berikut Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Ket*)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)	
1	Program	14	7	7	(7)	
2	Kegiatan	28	13	13	(15)	
3	Sub Kegiatan	56	25	24	(32)	
4	Pagu Anggaran	Rp. 13.897.919.600,00	Rp. 13.559.019.694,00	Rp. 13.925.897.173,00	Rp. 27.977.573,00	

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag TA 2025 jika dibandingkan dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 terdapat banyak pengurangan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

NO	KODE	a	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					13.897.919.600,00	13.559.019.694,00	13.925.897.173,00	27.977.573,00						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.692.919.600,00	7.435.677.694,00	7.605.359.043,00	-2.087.560.557,00							
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.692.919.600,00	7.435.677.694,00	7.605.359.043,00	-2.087.560.557,00							
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	25,59 11,12 0 64,55 4 100	25,59 11,50 0 64,55 4 100	9.072.919.600,00	7.245.677.694,00	7.466.009.043,00	-1.606.910.557,00							
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	90.000.000,00	38.451.500,00	33.451.500,00	-56.548.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000,00	22.439.000,00	17.439.000,00	-32.561.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14 Laporan	18 Laporan	40.000.000,00	16.012.500,00	16.012.500,00	-23.987.500,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</i>	100 %	100 %	6.217.000.000,00	5.857.598.767,00	6.177.274.216,00	-39.725.784,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	54 (26 Pr & 28 LK) Ora ng/bulan	54 (26 Pr & 28 LK) Ora ng/bulan	6.197.000.000,00	5.828.598.767,00	6.153.528.716,00	-43.471.284,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	19.000.000,00	13.745.500,00	3.745.500,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	42 Laporan	42 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	100 % 100 % 50%	100 % 100 % 0%	113.000.000,00	27.060.000,00	26.160.000,00	-86.840.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-40.250.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	11 Dokumen	11 Dokumen	3.000.000,00	17.310.000,00	16.410.000,00	13.410.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 (5 Lk & 5 Pr) Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah</i>	100 %	100 %	379.919.600,00	110.155.000,00	58.740.000,00	-321.179.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	369.919.600,00	92.330.000,00	42.330.000,00	-327.589.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	-	5.000.000,00	1.415.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	16.410.000,00	16.410.000,00	11.410.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Penambahan aset perangkat daerah</i>	6.00 %	-	370.000.000,00	0,00	0,00	-370.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	1.575.000.000,00	1.089.092.427,00	1.083.733.327,00	-491.266.673,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000,00	571.060.000,00	565.700.900,00	-534.299.100,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	431.314.057,00	431.314.057,00	106.314.057,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	86.718.370,00	86.718.370,00	-63.281.630,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara</i>	70 %	70 %	328.000.000,00	123.320.000,00	86.650.000,00	-241.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Mobil dan 13 Motor Unit	4 Mobil dan 13 Motor Unit	243.000.000,00	108.240.000,00	78.310.000,00	-164.690.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	30 Unit	30 Unit	35.000.000,00	15.080.000,00	8.340.000,00	-26.660.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	77 %	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00						
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah Dokumen RTKD yang disusun</i>	1 Dokumen	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Dinakerperindag, Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	1 Dokumen	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
			<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>	25 Orang	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	56.00 %	56.00 %	270.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-170.000.000,00						
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan</i>	53,85 %	53,85 %	230.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-130.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pencaker	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi													
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	70 Orang	20 (5 Pr & 15 Lk) Orang	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	1 Unit	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase LPKS yang dibina</i>	100 %	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	15 Lembaga	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas</i>	15 %	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	15 Perusahaan	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</i>	92 %	92 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00						
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL</i>	57.6 %	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pencaker, Pencaker Disabilitas	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja													
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>	75 Orang	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	15 Orang	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker</i>	29 %	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi UMKM dan Pariwisata	Pencaker dan Pemberi Kerja	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	60 dan 10 Orang	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja													
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	30 Orang	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	47.77 %	47.77 %	180.000.000,00	90.000.000,00	39.350.000,00	-140.650.000,00						
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</i>	91.46 %	91.46 %	60.000.000,00	50.000.000,00	15.450.000,00	-44.550.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pengusaha dan Pekerja Buruh	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	10 Perusahaan	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	1 (20 Perusahaan) Laporan	20 (perusahaan) Laporan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.450.000,00	-19.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</i>	62.5 %	62.5 %	120.000.000,00	40.000.000,00	23.900.000,00	-96.100.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pengusaha dan Pekerja Buruh	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	16 Perkara	16 Perkara	40.000.000,00	40.000.000,00	23.900.000,00	-16.100.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	1 dan 6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.205.000.000,00	6.123.342.000,00	6.320.538.130,00	2.115.538.130,00						
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.695.000.000,00	2.766.842.000,00	2.996.538.130,00	-698.461.870,00						
1,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	75 %	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00						
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	75 %	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang													
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	30 %	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C													
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	40 %	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70 %	70 %	3.180.000.000,00	1.721.342.000,00	1.886.650.450,00	-1.293.349.550,00						
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75 %	75 %	3.130.000.000,00	1.721.342.000,00	1.886.650.450,00	-1.243.349.550,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 (pasar senggol) Unit	-	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	5 Unit	2.928.000.000,00	1.721.342.000,00	1.886.650.450,00	-1.041.349.550,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 %	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	90 %	90 %	170.000.000,00	930.500.000,00	918.287.680,00	748.287.680,00						
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %	100.000.000,00	930.500.000,00	918.287.680,00	818.287.680,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	38.000.000,00	27.987.680,00	-32.012.320,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	5 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	892.500.000,00	890.300.000,00	850.300.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida</i>	75 %	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	12 Laporan	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	12 Laporan	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100 %	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00						
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan</i>	100 %	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal													
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal</i>	7 Pelaku Usaha	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	39.29 %	39.29 %	145.000.000,00	115.000.000,00	191.600.000,00	46.600.000,00						
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase UTPP yang ditera/tera ulang</i>	85.81 %	85.81 %	145.000.000,00	115.000.000,00	191.600.000,00	46.600.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	1500 Unit	1500 Unit	110.000.000,00	105.000.000,00	181.600.000,00	71.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	500 Orang	500 Orang	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	75 %	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00						
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	75 %	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perdagangan	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>	50 UMKM	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				510.000.000,00	3.356.500.000,00	3.324.000.000,00	2.814.000.000,00						
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0.70 %	1.5 %	425.000.000,00	3.356.500.000,00	3.324.000.000,00	2.899.000.000,00						
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	25 %	25 %	425.000.000,00	3.356.500.000,00	3.324.000.000,00	2.899.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Industri	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	1 dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	11 Dokumen	350.000.000,00	3.311.500.000,00	3.279.000.000,00	2.929.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui OSS	30 %	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00						
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	30 %	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Industri	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>	1 Dokumen	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													
			<i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>	1 Dokumen	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	15 %	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00						
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	4 %	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Pelaku Usaha Industri	

	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	1 Dokumen	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	J U M L A H					13.897.919.600,00	13.559.019.694,00	13.925.897.173,00	27.977.573,00							

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025. Perubahan rencana kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Diharapkan Program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Sungailiat, 20 Juni 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian
dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Jend. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka,
Kode Pos 33215 Telp (0717)-92522 Fax (0717)-92522

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
NOMOR :188.45/ 080.a/DINAKERPERINDAG/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
- 23 Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
- 24 Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
- 25 Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
- 27 Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
- 28 Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);

29 Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025;
 - b. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 April 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



ASEP SETIAWAN
KABINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/080.a/DINAKERPERINDAG/2025
TANGGAL : 28 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Ahli Pertama Perencana	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 April 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	30 April 2025		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 ke SIPD	2 – 8 Mei 2025		Seluruh PD
3	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	9 Mei 2025		Bappeda
4	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	9 – 23 Mei 2025		Seluruh PD
5	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	9 Mei 2025		Bappeda
6	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2025	26 Mei 2025	Minggu ke-4 bulan Mei 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
7	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	26 Mei 2025		Bappeda
8	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	27 Mei – 9 Juni 2025	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
9	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 ke Bappeda	10 Juni 2025		Seluruh PD
10	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 oleh Bappeda	10 – 13 Juni 2025	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda

11	Penyusunan Ranperkada P-Renja PD Tahun 2025	16 Juni 2025		Bappeda
12	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Juni 2025		Bappeda
13	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2025	20 Juni 2025	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

**TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA TAHUN PD TAHUN 2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	76,26	74,75	76,26	76,26
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	25,35	25,59	25,59	25,59
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	11,50	11,12	11,50	11,50
	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persen	0	0	0	0
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalisme ASN PD	Indeks	64,16	64,55	64,55	64,55
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menggunakan atribut lengkap	Persen	100	100	100	100
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Persen	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	-	50	50	-
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	3	4	4	4
	Terlaksananya layanan jasa adminstrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100
	Terlaksananya Layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen	90	100	100	100
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	Persen	65	70	70	70

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA TAHUN PD TAHUN 2025
2.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,39	68,19	68,19	68,19
	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	Persen	42,58	56,00	56,00	56,00
	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan	Persen	29,03	53,85	53,85	53,85
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	Persen	46,5	47,77	47,77	47,77
	Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Persen	86,9	91,46	91,46	91,46
	Terselesainya penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	62,5	62,5	62,5	62,5
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,09	12,54	12,54	12,54
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi	Persen	70	70	70	70
	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	62,5	75	75	75
	Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	Persen	102,86	90	90	90
	Meningkatnya Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	Persen	85	90	90	90
	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	30,77	39,29	39,29	39,29
	Meningkatnya UTP yang ditera/tera Ulang	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan	Persentase UTP yang ditera/tera ulang	Persen	130,64	85,81	85,81	85,81

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA TAHUN PD TAHUN 2025
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	24,24	24,47	24,47	24,47
	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitasi untuk pengembangan Produk IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	Persen	8,08	0,7	0,7	1,5
	Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persen	20	25	25	25

Sungailiat, 5 Juni 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. SEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196705041994021013